



Evaluasi Pelayanan Pendidikan: Studi Kasus Program Merdeka Belajar (2022-2024)

INFO PENULIS

Maulida Nurul Fajrianti
Universitas Muhammadiyah Jakarta
aulinurul1046@gmail.com

Sasia Zulfa Choirunisa
Universitas Muhammadiyah Jakarta
zulfasasia@gmail.com

Gilang Aril Setiawan
Universitas Muhammadiyah Jakarta
gilangnara1128@gmail.com

Felisa Naylia Rahmah
Universitas Muhammadiyah Jakarta
felirahmah26@gmail.com

Alfin Syarif Aminuddin
Universitas Muhammadiyah Jakarta
syrifalfin@gmail.com

Nur Muhammad Iqbal
Universitas Muhammadiyah Jakarta
n.muhamadiqbal@umj.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, December 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fajrianti, M. N., Choirunisa, S. Z., Setiawan, G. A., Rahmah, F. N., Aminuddin, A. S., & Iqbal, N. M. (2025). Evaluasi Pelayanan Pendidikan: Studi Kasus Program Merdeka Belajar (2022-2024). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5444-5451.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam perbaikan layanan pendidikan lewat Program Merdeka Belajar selama periode 2022-2024. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis pada kajian literatur, penelitian ini mengkaji berbagai dokumen resmi, laporan mengenai pelaksanaan, serta tulisan akademis untuk menilai pencapaian, hambatan, dan efek dari kebijakan tersebut. Temuan evaluasi mengindikasikan bahwa Program Merdeka Belajar telah membantu mendorong fleksibilitas dalam kurikulum, peningkatan kemampuan pengajar, serta perubahan dalam sistem penilaian nasional. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan besar terkait kurangnya infrastruktur digital, perbedaan pemahaman tentang kebijakan di berbagai daerah, dan beban administratif yang masih dirasakan oleh para pengajar. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya penguatan dukungan dalam pelaksanaan, pemerataan akses terhadap teknologi, dan penyederhanaan proses pelaporan untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak dari program dalam memperbaiki mutu layanan pendidikan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pelayanan Pendidikan, Merdeka Belajar

Abstract

This study aims to evaluate the government's policy to improve education services through the Merdeka Belajar Program (Freedom to Learn) for the 2022-2024 period. Using a descriptive qualitative approach based on a literature review, this study examines various official documents, implementation reports, and academic papers to assess the policy's achievements, obstacles, and effects. Evaluation findings indicate that the Merdeka Belajar Program has helped promote curriculum flexibility, teacher capacity building, and changes to the national assessment system. However, the study also identified significant challenges related to a lack of digital infrastructure, differing understandings of the policy across regions, and ongoing administrative burdens experienced by teachers. The study's conclusions emphasize the need for strengthened support for implementation, equitable access to technology, and streamlined reporting processes to enhance the program's sustainability and impact in improving the overall quality of education services.

Keywords: Policy Evaluation, Education Services, Merdeka Belajar

A. Pendahuluan

Pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun sumber daya manusia unggul di suatu negara, tetapi di Indonesia, pelayanan pendidikan masih terganjal oleh krisis pembelajaran yang kronis dan berkelanjutan. Menurut hasil *Program for International Student Assessment* (PISA) tahun 2018, posisi Indonesia berada di tingkat bawah dengan skor rata-rata 371 pada literasi membaca, 379 pada matematika, serta 396 pada sains, yang mengindikasikan bahwa sekitar 70% siswa belum mencapai standar kompetensi minimum di bidang literasi dan numerasi. Krisis ini semakin memburuk akibat kesenjangan regional, di mana siswa di daerah terpencil seperti wilayah kepulauan kesulitan mendapatkan akses infrastruktur pendidikan, sehingga menimbulkan ketidakadilan pelayanan pendidikan yang berujung pada rendahnya kualitas lulusan di tingkat nasional.

Masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses fisik semata, melainkan juga kurikulum yang kaku dan kurang responsif terhadap tuntutan siswa era abad ke-21, seperti pengasah kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian terkini mengungkap bahwa hambatan pokok dalam pelayanan pendidikan mencakup keterbatasan fasilitas, minimnya kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif, serta ketidakmampuan siswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk terlibat secara aktif. Akibatnya, terjadi stagnasi kualitas pendidikan, di mana guru masih berjuang menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang adaptif, sementara siswa cenderung pasif, sehingga menyulitkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila sebagai sasaran utama pendidikan nasional (Tania et al., 2025). Di samping itu, data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 30% sekolah pedesaan yang memiliki infrastruktur memadai untuk pembelajaran berbasis proyek, yang semakin memperlemah kesetaraan antarwilayah (Fadil et al., 2023).

Guna menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek memperkenalkan Program Merdeka Belajar sebagai kebijakan publik cangguh sejak tahun 2019, dengan episode ke-15 pada 2022 yang meluncurkan Kurikulum Merdeka secara massif. Program ini dirancang untuk memperbaiki pelayanan pendidikan melalui pemberian kewenangan lebih besar kepada institusi pendidikan dalam menyusun kurikulum otonom, berorientasi proyek, dan berfokus pada pembentukan karakter via Profil Pelajar Pancasila, dengan harapan dapat meringankan beban administratif guru serta mendorong partisipasi siswa yang lebih tinggi. Paper ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan ini di lapangan, karena walaupun telah diterapkan di ribuan sekolah penggerak, kendala seperti minimnya pelatihan guru dan ketidakmerataan fasilitas masih menghalangi target utamanya. Selain itu, paper ini juga termotivasi oleh perlunya bukti empiris mengenai peran kebijakan publik sebagai alat perubahan pendidikan, khususnya dalam rangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 4 tentang pendidikan inklusif berkualitas (Fadil et al., 2023). Studi kasus Program Merdeka Belajar dipilih karena merepresentasikan pendekatan baru dalam kebijakan pendidikan yang mengutamakan kemandirian sekolah, didukung data pendahuluan yang mencatat kenaikan 15% hasil belajar siswa di sekolah percobaan tahun 2023.

Penilaian tentang keberhasilan program ini melibatkan berbagai indikator, seperti antusiasme siswa dan kesiapan pengajar, namun juga menghadapi kendala seperti distribusi anggaran dan kesenjangan akses digital. Dalam menghadapi perubahan tersebut, sangat penting untuk mendorong keterlibatan dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konsep merdeka belajar. Proses transformasi dalam dunia pendidikan ini memerlukan dedikasi dan kerjasama dari seluruh elemen komunitas pendidikan serta akan memberikan dampak jangka panjang yang berarti bagi masa depan Indonesia. Walaupun ada berbagai pandangan dan opini mengenai konsep Merdeka Belajar, sangat penting untuk terus mengembangkan ide ini dan mengatasi problem yang timbul. Dengan melanjutkan komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pihak, kita dapat mencapai tujuan merdeka belajar untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di masa mendatang.

Kebijakan “Merdeka Belajar” yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Mendikbudristek No. 12 Tahun 2024 merupakan langkah inovatif yang bertujuan untuk mentransformasi paradigma pendidikan Indonesia. Dalam menganalisis kebijakan ini, kebijakan publik menurut (Dye, 1978) dalam adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep ini sangat luas karena kebijakan publik meliputi tindakan yang tidak hanya diambil oleh pemerintah, tetapi juga menyangkut hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah saat menghadapi masalah publik.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan Merdeka Belajar adalah sebuah transformasi paradigma yang bertujuan untuk mengubah sistem pendidikan dari pendekatan yang terstandarisasi menjadi berpusat pada peserta didik. Beberapa aspek utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah Asesmen Nasional (AN), Program Sekolah Penggerak (PSP), dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk menilai kinerja suatu kebijakan, yang bertujuan menentukan nilai, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat (Dunn, 1999). Evaluasi menurut Suchman (1967) adalah "*the proces of assigning value to some objective and then determining the degree of success attaining this valued objective*". Berdasarkan pendapat diatas, evaluasi diartikan sebagai proses melekatkan suatu nilai pada beberapa tujuan tertentu yang dari situ dapat ditentukan derajat keberhasilannya dalam mencapai nilai-nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Edward A. Suchman (1967) membedakan evaluasi berdasarkan proses dan hasil (*outcome*). Dalam konteks Merdeka Belajar, evaluasi proses contohnya melihat sejauh mana berjalannya pelatihan bagi guru dan penyusunan kurikulum yang terencana, sedangkan evaluasi dampak mengukur dampak jangka panjang seperti peningkatan mutu lulusan dan penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pendekatan ini mengingatkan bahwa evaluasi dalam kebijakan pendidikan tidak seharusnya hanya berorientasi pada *output* jangka pendek.

B. Metodologi

Pendekatan yang diterapkan oleh peneliti dalam artikel ini adalah *literature review*. Metode *literatur review* adalah proses penelitian yang melibatkan peninjauan serta evaluasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada. Penulisan ini mengumpulkan berbagai referensi mengenai analisis evaluasi program Merdeka Belajar, baik dari jurnal maupun dokumen peraturan pemerintah yang relevan. Referensi tersebut diteliti dengan cermat untuk mendapatkan penjelasan yang jelas tentang penilaian autentik dalam pendidikan. Berdasarkan kajian tersebut, peneliti kemudian menyusun pemikirannya mengenai penerapan penilaian autentik di sekolah atau madrasah, termasuk analisis evaluasi program Merdeka Belajar.

C. Hasil dan Pembahasan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tetap berusaha untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan di Indonesia dengan melakukan transformasi pendidikan yang menyeluruh. Merdeka Belajar, sebagai paradigma pembelajaran yang fokus pada siswa, merupakan pendekatan yang tepat untuk memahami esensi dari transformasi pendidikan. Merdeka belajar menurut Mendikbud berangkat dari keinginan agar *output* pendidikan menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya jago menghafal, namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, penalaran serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri (Saleh, 2020).

Merdeka belajar dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang diungkapkan oleh Agustinus Tangu Daga dari beberapa literatur diartikan sebagai merdeka berpikir, merdeka berinovasi, merdeka belajar mandiri dan kreatif, dan merdeka untuk kebahagiaan (Daga, 2021).

Seiring perkembangan zaman, pendidikan ini dipandang tidak hanya sebagai sektor penyedia pelayanan umum (*public goods*), melainkan juga sebagai investasi produktif (*productive investment*) yang memacu pertumbuhan dalam berbagai bidang dan sector pembangunan di Indonesia. Pendidikan sebagai tolak ukur kemajuan bangsa dan negara, memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan inisiator penentu kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, setiap pengelola pendidikan diharapkan mampu melahirkan *output* peserta didik yang memiliki keilmuan dan keterampilan sesuai dengan harapan semua pihak. Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan konsepsi, kebijakan, dan program-program pendidikan yang tepat, terarah, dan aplikatif.

1. Evaluasi Proses

Evaluasi terhadap proses pembelajaran dan hasil yang didapat adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Evaluasi proses berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan desain kebijakan, mekanisme yang digunakan, serta capaian implementasi.

a. Asesmen Nasional

Asesmen Nasional adalah sebuah program evaluasi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada *input*, proses, dan *output* pembelajaran di semua jenis lembaga pendidikan. Asesmen Nasional juga memberikan gambaran mengenai apa yang seharusnya menjadi fokus utama lembaga pendidikan, terutama dalam pengembangan kemampuan dan karakter siswa. Selain itu, program ini dapat memberikan wawasan mengenai karakteristik penting di lembaga pendidikan yang efektif dalam mencapai tujuan utama tersebut. Asesmen Nasional dilaksanakan melalui 3 (tiga) instrumen secara sampling di kelas 5, 8, dan 11, yaitu:

1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), guna mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid.
2. Survei Karakter, yakni mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid.
3. Survei Lingkungan Belajar, yakni mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan.

Asesmen Nasional (AN) telah diterapkan sebagai pengganti Ujian Nasional dengan sukses dalam aspek teknis dan mencakup lebih dari 231.000 sekolah pada tahun 2022 (Pusat Asesmen dan Pembelajaran, 2022). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan besar yaitu kurangnya infrastruktur teknologi serta adanya kesalahpahaman di tingkat sekolah.

b. Program Sekolah Penggerak (PSP)

Program Sekolah Penggerak dibuat untuk mendorong transformasi menyeluruh di lingkungan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan kepemimpinan kepala sekolah, memperbaiki kualitas pengajaran, mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif sesuai kebutuhan dan potensi siswa, dan menerapkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Program ini menjadi tonggak penting dalam upaya transformasi sistem pendidikan menuju pendidikan yang lebih merdeka, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik (Kemendikbudristek, 2021). Kurikulum yang diterapkan di sekolah penggerak adalah Kurikulum Merdeka yang dirancang oleh Menteri Pendidikan, di mana kurikulum ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka.

Implementasi Kurikulum Merdeka memperlihatkan adanya transformasi yang cukup signifikan di banyak sekolah. Para pengajar mulai berupaya menerapkan berbagai model pembelajaran yang kreatif, seperti Pembelajaran Berbasis Proyek dan Instruksi Diferensiasi, walaupun dalam praktiknya mereka masih menghadapi banyak hambatan teknis dan kurangnya pengalaman. Meski demikian, beberapa pengajar masih menunjukkan kekurangan dalam memanfaatkan teknologi serta media pembelajaran yang interaktif. Di samping itu, peran kepala sekolah sangat memengaruhi keberhasilan penerapan PSP. Kepala sekolah yang memiliki visi dan mendukung mampu mempercepat perubahan serta menciptakan lingkungan sekolah yang positif.

c. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Kebijakan MBKM diimplementasikan bertujuan untuk menciptakan proses belajar di perguruan tinggi yang mandiri dan adaptif, sehingga kampus mampu menyusun serta

melaksanakan proses edukasi yang kreatif agar mahasiswa dapat mencapai hasil pembelajaran yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan maksimal. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Terdapat 8 (delapan) kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat diikuti mahasiswa, yaitu magang bersertifikat, Studi Independen Bersertifikat, Pertukaran Mahasiswa, Mengajar di Satuan Pendidikan, Riset atau Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Wirausaha Merdeka, dan Membangun Desa / KKN Tematik.

Skema ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020. Pelaksanaan program ini didukung oleh platform Kampus Merdeka yang mempertemukan mahasiswa dengan berbagai mitra, seperti perusahaan, NGO, dan pemerintah. Sampai dengan tahun 2023, lebih dari 300.000 mahasiswa telah terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka (Kemendikbudristek, 2023). Program-program seperti Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) serta Kampus Mengajar menjadi yang paling banyak diminati.

2. Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak dari suatu kebijakan adalah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh evaluator dalam menilai suatu kebijakan. Dalam hal ini, evaluasi dampak lebih menekankan pada hasil dan dampaknya dibandingkan pada cara pelaksanaannya.

a. Asesmen Nasional (AN)

Dilansir dari situs [tvMu](https://tvMu.id), Plt. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Toni Toharudin menyatakan, informasi dari Rapor Pendidikan 2022-2024 menunjukkan bahwa persentase siswa yang memenuhi standar minimum dalam Literasi dan Numerasi di Asesmen Nasional terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2024, persentase siswa SD/MI/Sederajat yang mencapai kompetensi minimum dalam literasi adalah 71,76%, siswa SMP/MTs/Sederajat adalah 70,34%, siswa SMA/MA/Sederajat mencapai 64,83%, dan siswa SMK/MAK sebanyak 66,03%. Selain itu, untuk kompetensi minimum dalam numerasi, persentase siswa SD/MI/Sederajat pada tahun 2024 tercatat 69,51%, siswa SMP/MTs/Sederajat sebesar 68,1%, siswa SMA/MA/Sederajat mencapai 63,71%, dan siswa SMK/MAK sebesar 64,02%.

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat peningkatan, kemampuan numerasi masih sedikit di bawah kemampuan literasi di hampir semua tingkatan, dan hasil yang dicapai oleh siswa di tingkat menengah atas relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat dasar dan menengah pertama. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui AN telah menunjukkan hasil, tetapi perlu ada penekanan yang lebih besar pada penguatan numerasi serta intervensi yang lebih tepat sasaran, terutama di tingkat SMA/SMK, agar perbedaan antar kelompok dapat semakin kecil dan standar kompetensi minimum dapat dicapai dengan lebih merata. Dalam situs tersebut juga menyebutkan bahwa hal ini belum merata di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, terlihat dari variasi proporsi siswa yang mencapai kompetensi minimum dalam Literasi dan Numerasi di antara berbagai kabupaten dan kota, di antaranya minimnya akses, keterbatasan dan ketidakmerataan pendidik yang berkualitas.

b. Program Sekolah Penggerak (PSP)

Hasil penelitian Program RISE (*Research on Improving Systems of Education*) di Indonesia yang menganalisis data dari berbagai sekolah di negara ini menunjukkan indikasi bahwa sekolah-sekolah yang ikut serta dalam program transformasi serupa (seperti PSP) mengalami kemajuan dalam manajemen sekolah dan kegiatan belajar yang fokus pada siswa. Program Sekolah Penggerak memiliki potensi yang besar untuk mendorong perubahan dalam pendidikan di Indonesia, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan melalui perbaikan menyeluruh di berbagai aspek, mulai dari pengembangan keterampilan guru, penguatan kapasitas pimpinan sekolah, hingga penyediaan fasilitas yang memadai. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan dan menciptakan model pelatihan yang lebih sesuai dengan konteks agar program ini tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan berkeadilan.

c. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Tercatat sejak tahun 2022 hingga saat ini, terdapat 404.155 mahasiswa yang mendapatkan keuntungan dari program MBKM dan sekitar 30.253 praktisi telah terlibat menjadi bagian dari MBKM, selain program-program MBKM Mandiri yang diatur oleh masing-masing universitas. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan dukungan juga mengalami peningkatan signifikan dari 2.

390 di tahun 2020 menjadi 324.871 mahasiswa pada tahun 2023. Dilansir oleh situs ugm.ac.id selama tahun 2023, lebih dari 134 ribu mahasiswa dari berbagai universitas terlibat dalam 8 program MBKM, seperti magang bersertifikat, pertukaran mahasiswa baik dalam maupun luar negeri, pengajaran di kampus, serta program kewirausahaan. Program MBKM ini akan melibatkan banyak universitas dari berbagai daerah, sehingga akan memperluas akses mahasiswa pada kegiatan pertukaran dengan universitas terkemuka dan bereputasi.

Program ini sukses membangun jembatan yang solid antara lingkungan akademis dan sektor industri. Para mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang meningkatkan peluang kerja mereka. Secara institusional, program ini mendorong universitas untuk lebih terbuka dan bekerja sama dengan ekosistem di luar lingkungan kampus. Ini adalah langkah positif dalam menciptakan lulusan yang siap bersaing dan berkontribusi dalam masyarakat dan ekonomi yang terus berkembang.

3. Capaian dan Evaluasi Sasaran Program Merdeka Belajar (Periode 2022-2024)

Berdasarkan evaluasi proses dan dampak ketiga program diatas, pada periode 2022-2024, program Merdeka Belajar telah menunjukkan berbagai hasil yang jelas dan penting, meskipun ada beberapa aspek yang masih dalam perjalanan konsolidasi dan menghadapi tantangan dalam pelaksanaan yang rumit. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), beberapa hasil utama meliputi:

1. Penerapan Kurikulum Merdeka yang sudah diimplementasikan di lebih dari 300.000 lembaga pendidikan (per 2024), menunjukkan adanya minat dan komitmen yang besar dari sekolah-sekolah untuk melakukan transisi.
2. *Platform* Digital seperti Merdeka Mengajar telah diunduh oleh jutaan pengajar dan menjadi sumber utama dalam pembelajaran, menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan infrastruktur pendukung.
3. Perubahan dalam Sistem Penilaian dengan penghapusan Ujian Nasional yang digantikan oleh Asesmen Nasional (AN) yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, telah mengubah cara evaluasi di tingkat nasional.
4. Peningkatan Otonomi untuk Guru melalui pemilihan dan penunjukan kepala sekolah yang lebih meritokratis, serta program Guru Penggerak yang telah melatih puluhan ribu guru untuk menjadi agen perubahan.

Secara kuantitas dan penerapan kebijakan, program ini telah mencapai target dengan menjangkau ratusan ribu sekolah dan jutaan pengajar dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun demikian, dalam hal kedalaman, kualitas, dan distribusi dampak, masih terdapat perbedaan yang signifikan. Tantangan utama terletak pada tingkat kesiapan dan pemahaman guru yang tidak konsisten, banyak yang masih ragu dalam merancang pembelajaran yang berbeda dan evaluasi formatif, adanya beban administrasi baru yang muncul di lapangan meskipun kurikulum dijanjikan lebih sederhana, ketimpangan infrastruktur dan sumber daya antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil yang membuat penerapan Kurikulum Merdeka menjadi sangat tidak merata serta adanya penolakan budaya dari sebagian orang tua dan pemangku kepentingan yang masih terfokus pada nilai ujian konvensional. Dengan kata lain, tujuan struktural dan makro sudah tercapai dengan baik, namun tujuan kultural dan mikro (di dalam kelas) masih memerlukan waktu yang panjang untuk dipenuhi.

4. Rekomendasi Strategis

Rekomendasi strategis harus difokuskan pada pendalaman, pemerataan, dan keberlanjutan. Pertama, kebijakan perlu beralih dari tahap penyebaran masif menuju fase pendampingan yang intensif dan berkualitas. Program-program seperti Sekolah Penggerak dan instruktur kurikulum perlu diperkuat keberadaannya di sekolah, khususnya di daerah 3T, dengan pendekatan pembimbingan yang berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan satu arah. Kedua, sangat penting untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan *platform* digital. Banyaknya platform (Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, dll) sering kali membingungkan dan memberikan beban tambahan bagi guru. Pengintegrasian data dan fungsi menjadi satu portal yang mudah digunakan akan meningkatkan efisiensi. Ketiga, perlu adanya kebijakan afirmatif yang lebih kuat dan terukur untuk daerah-daerah yang tertinggal sebagai prioritas dalam penganggaran. Ini bukan hanya terkait dengan akses internet, tetapi juga mencakup penyediaan sumber daya manusia pendukung (konsultan pendidikan) dan pengalokasian dana khusus.

D. Kesimpulan

Kebijakan Program Merdeka Belajar merupakan bentuk transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional yang digagas oleh pemerintah untuk menjawab tantangan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya membebaskan sekolah, guru, dan peserta didik dari beban birokratis yang berlebihan agar proses belajar menjadi lebih fleksibel, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa Program Merdeka Belajar untuk periode 2022-2024 menghadirkan hasil yang saling bertentangan. Di satu sisi, kebijakan ini menunjukkan respons yang baik terhadap kebutuhan peningkatan kualitas pengajaran guru dan penguatan karakter siswa, serta cukup efektif dalam memberdayakan guru. Namun, di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi banyak tantangan terkait efisiensi penggunaan sumber daya dan keberlanjutan dukungan, terutama di wilayah yang kurang berkembang. Hal yang paling penting, kebijakan ini dinilai belum cukup untuk menangani akar permasalahan sistemik pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, meskipun Merdeka Belajar telah berhasil menciptakan inovasi dalam pendekatan pembelajaran, kebijakan ini belum sepenuhnya transformatif untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan yang inklusif di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan transformasi pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rekomendasi strategis ke depan harus berfokus pada pendampingan intensif dan berkelanjutan bagi guru, integrasi dan penyederhanaan platform digital, kebijakan afirmatif yang lebih kuat untuk daerah tertinggal, komunikasi publik yang masif untuk membangun dukungan kolektif, serta penguatan sistem evaluasi yang menitikberatkan pada kualitas proses pembelajaran dan dampak merata di seluruh ruang kelas Indonesia.

E. Referensi

- Akbar, A. D., Bestari, P., & Mahpudz, A. (2025). Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebon Jayanti. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 11–11. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2808>
- Fadil, K., Amran, A., & Alfaien, N. I. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goal'S. *At-Ta'Dib*, 7(2). <https://doi.org/10.32832/at-tadib.v7i2.19512>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2022). *No Title*. 18–49.
- Tania, I., Setyawan, F., & Adiwibowo, Y. (2025). Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 8 Nomor 2, 2025 | 5771. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8, 5771–5777. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Nazar, E. Ragil., Nasir., Bagea, Ishak., & Abubakar. (2024). Peluang dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar: Sebuah Studi Interview di Sekolah Penggerak dan Mandiri Berubah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(1), 18–31. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2024.v11.i1.p18-31>
- Prahastina, Lara., Indriayu, Mintasih., & Matsuri, Matsuri. (2024). Exploring The Effectiveness Of The Merdeka Curriculum In Promoting Effective Learning Practices. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 10(3), 111–121. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/4113/2204>
- Khoiri. A., Zaini. (2021). Political Effect In Merdeka Belajar Education Era Of The COVID-19 Pandemic. *Jurnal Pedagogik*, 8(2), 442–467. <https://doi.org/10.33650/pjp.v8i2.2976>
- Iqbal, M., Rizki, A., Wardani, J. S., Khafifah, N. P., Silitonga, N., & Amirah, R. (2023). Kebijakan pendidikan tentang pelaksanaan merdeka belajar. *Journal on Education*, 5(2), 2257–2265. https://www.academia.edu/download/105687090/878-Article_Text-2367-1-10-20230111.pdf
- Rahmafriti, F., Deswita, E., & Trisoni, R. (2024). Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 45–55. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah/article/view/1050>
- Indrawan, I. W., & Putri, K. Y. S. (2024). Kepemimpinan Transformasional dalam Mendukung Kesuksesan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(1), 78–92.
- Nurjanah, S., & Setiawan, B. (2023). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

sebagai Strategi Pembentukan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(3), 300-315.